



RANKHIR RENCANA KERJA (RENJA PD)

KECAMATAN GARUM TAHUN 2026

**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN GARUM**

Jalan Raya Penataran 16 Garum Blitar Kode Pos 66182
Email: kecgarum@blitarkab.go.id
Website: www.kec-garum.blitarkab.go.id
Sosial Media: @kecamatanagarum24



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Garum Tahun 2026 telah dapat diselesaikan.

Penyusunan dokumen ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Blitar Nomor B/027.02.04.01/287/409.3.2/2025. Renja PD Kecamatan Garum Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026, serta berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Garum Tahun 2021-2026 dan arah kebijakan dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

Rancangan Akhir Renja PD Kecamatan Garum Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas serta landasan penyusunan anggaran di lingkungan Kecamatan Garum untuk Tahun Anggaran 2026.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, berbagai upaya korektif serta masukan dari semua pihak senantiasa kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhirnya, atas dukungan dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Garum, 08 Agustus 2025

CAMAT GARUM


FRAZAO CASTELO, S.E.
Pembina

NIP. 19780515 200012 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1... Latar Belakang.....	4
1.2... Landasan Hukum	5
1.3... Maksud dan Tujuan.....	6
1.4... Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1... Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 10	16
2.2... Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3... Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	18
2.4... Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	22
2.5... Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1... Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2... Tujuan dan Sasaran Renja PD	37
3.3... Program dan Kegiatan	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	49
BAB V PENUTUP	62
5.1... Catatan Penting	62
5.2... Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	63
5.3... Rencana Tindak Lanjut	65

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah proses fundamental yang sistematis untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan berjalan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun dokumen perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD Kecamatan Garum Tahun 2026 ini merupakan wujud kepatuhan terhadap kerangka regulasi tersebut, yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan secara spesifik diinstruksikan melalui Surat Edaran Bupati Blitar Nomor B/027.02.04.01/287/409.3.2/2025 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2026.

Penyusunan Renja PD untuk tahun 2026 memiliki arti dan momentum yang sangat strategis. Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari periode perencanaan jangka menengah daerah yang baru, sekaligus menjadi tahun implementasi penuh pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, dokumen ini menjadi instrumen operasional perdana bagi Kecamatan Garum untuk menerjemahkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yaitu **"KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA"**, beserta Misi dan agenda prioritas **"Catur Dharma"** ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang konkret dan terukur untuk satu tahun ke depan.

Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan, Renja PD memiliki kedudukan yang vital dalam menjaga sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen. Secara hierarkis, Renja PD Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026. Jika RKPD menetapkan tema, prioritas, dan plafon anggaran makro untuk tingkat kabupaten, maka Renja PD rincinya menjadi rencana aksi yang spesifik di tingkat kecamatan. Di sisi lain, penyusunan Renja PD ini juga harus tetap selaras dan memastikan tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen strategi lima tahunan perangkat daerah, yaitu Rencana Perubahan Kecamatan Garum Tahun 2021-2026. Seluruh program dan kegiatan yang diusulkan juga berlandaskan pada tugas dan fungsi Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022.

Pada akhirnya, dokumen Rancangan Akhir Renja PD Kecamatan Garum Tahun 2026 ini akan berfungsi sebagai instrumen fundamental yang menjembatani antara tahapan perencanaan strategis dengan tahap penganggaran. Seluruh program, kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang tertuang di dalamnya akan menjadi dasar utama bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selanjutnya, RKA-PD tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, dokumen ini memastikan adanya alur yang jelas dan akuntabel dari visi hingga alokasi anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Garum Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 (sesuai nomor Perda setelah ditetapkan);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
15. Surat Edaran Bupati Blitar Nomor B/027.02.04.01/267/409.3.2/2025 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Gerum Tahun 2026 dimaksudkan untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang komprehensif, terukur, dan sistematis. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman operasional resmi bagi Kecamatan Gerum dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh program dan kegiatan prioritas selama satu tahun anggaran.

Secara lebih rinci, maksud dari penyusunan Renja PD ini adalah:

1. Menjadi Instrumen Penjabaran Dokumen Strategis: Menerjemahkan sasaran dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026 ke dalam rencana aksi yang lebih teknis dan spesifik di tingkat kecamatan.
2. Menjamin Konsistensi Perencanaan: Memastikan adanya keselarasan dan kesinambungan antara perencanaan tahunan (Renja PD) dengan target-target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Gerum Tahun 2021-2026.
3. Menjadi Landasan Penganggaran: Menyediakan dasar yang jelas dan akuntabel bagi Kecamatan Gerum dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada APBD Kabupaten Blitar Tahun 2026.

4. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja: Menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pengukuran dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan, sehingga setiap program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan pencapaiannya kepada pimpinan dan masyarakat.

Dengan demikian, Renja PD Tahun 2026 ini menjadi dokumen sentral yang menghubungkan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan siklus penganggaran tahunan, demi tercapainya efektivitas dan efisiensi pembangunan di Kecamatan Garum.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Garum Tahun 2026 memiliki beberapa tujuan strategis yang saling berkaitan, yang dirancang untuk memastikan proses pembangunan di tingkat kecamatan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Dokumen Perencanaan Tahunan yang Komprehensif dan Mengikat. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan sebuah dokumen perencanaan formal yang menjadi pedoman resmi dan mengikat bagi seluruh aparatur di lingkungan Kecamatan Garum. Dokumen ini bertujuan untuk mengarahkan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran, agar fokus pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diprioritaskan untuk Tahun Anggaran 2026, sehingga mencegah terjadinya tumpang tindih, duplikasi, atau kegiatan yang tidak sejalan dengan sasaran strategis.
2. Merumuskan Rencana Aksi yang Responsif dan Berbasis Bukti (Evidence-Based). Tujuan selanjutnya adalah merumuskan sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, serta alokasi pendanaan indikator yang tidak hanya bersifat aspiratif, tetapi juga responsif terhadap kondisi riil. Perumusan ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya (2024), di mana keberhasilan dan kegagalan diidentifikasi untuk menjadi pelajaran. Dengan demikian, rencana yang disusun lebih relevan dan memiliki kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi.
3. Menjamin Sinergi dan Integrasi Perencanaan Pembangunan (Vertical and Horizontal Alignment). Dokumen ini bertujuan untuk memastikan adanya keselarasan dan keterpaduan yang kuat antara rencana kerja di tingkat kecamatan dengan agenda pembangunan di tingkat kabupaten. Secara vertikal, program dan kegiatan Kecamatan Garum harus berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian sasaran

prioritas dalam RKPD Kabupaten Bitar Tahun 2026 dan Visi-Misi Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Bitar Tahun 2023-2029. Hal ini penting untuk menciptakan sinergi dan memastikan bahwa Kecamatan Garum bergerak seiring dengan arah pembangunan daerah secara keseluruhan.

4. Menyediakan Landasan yang Akuntabel untuk Penganggaran dan Pengukuran Kinerja. Tujuan terakhir adalah menyediakan dasar yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-PD) Tahun 2026. Dengan adanya keterkaitan yang jelas antara program yang direncanakan dengan anggaran yang dialokasikan, dokumen ini menjadi instrumen penting untuk akuntabilitas. Selain itu, indikator dan target kinerja yang ditetapkan di dalamnya akan berfungsi sebagai tolok ukur (benchmark) utama dalam melakukan evaluasi dan pelaporan kinerja di akhir tahun anggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranja) PD Kecamatan Garum Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika yang mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 dan Surat Edaran Bupati Bitar Nomor B/027.02.04.01/267/409.3.2/2023. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang utuh, terstruktur, dan mudah dipahami mengenai alur perencanaan tahunan perangkat daerah. Sistematika penulisan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan kerangka dasar penyusunan dokumen. Di dalamnya diuraikan Latar Belakang yang menjelaskan konteks strategis penyusunan Ranja PD 2026, Landasan Hukum yang menjadi dasar yuridis, Maksud dan Tujuan yang ingin dicapai, serta diakhiri dengan Sistematika Penulisan yang menguraikan struktur dokumen.

2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Bab ini berisi analisis evaluasi yang komprehensif terhadap kinerja Kecamatan Garum pada tahun-tahun sebelumnya sebagai landasan untuk merumuskan rencana tahun 2026. Pembahasan mencakup Evaluasi Pelaksanaan Ranja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, identifikasi Isu-isu Penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, telaah terhadap Rancangan Awal RKPD, serta rekapitulasi Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.

3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

Bab ini merumuskan arah strategis Kecamatan Garum untuk tahun 2026. Dimulai dengan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yang relevan, bab ini kemudian menetapkan Tujuan dan Sasaran Renja PD yang spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, dirumuskan Rencana Program dan Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya.

4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini merupakan inti dari dokumen perencanaan operasional, yang menyajikan rincian lengkap mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Garum Tahun 2026. Uraian pada bab ini merupakan penjabaran detail dari Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang telah diinput pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mencakup program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu indikatif.

5. BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berfungsi sebagai penutup yang merangkum poin-poin krusial dan arahan untuk implementasi. Di dalamnya akan diuraikan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus dipatuhi, serta rencana tindak lanjut untuk memastikan implementasi Renja PD 2026 dapat berjalan efektif dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Kajian ini merupakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Garum tahun lalu, yaitu Tahun 2024 (sebagai tahun *n-2*), serta menyajikan perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, yaitu Tahun 2025 (sebagai tahun *n-1*). Tinjauan ini mengacu pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Garum Tahun 2024 dan realisasi Anggaran Kecamatan Garum Tahun 2024, yang kemudian dihubungkan dengan target capaian Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Garum Tahun 2021-2026 untuk menilai progres pencapaian sasaran jangka menengah dan mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, serta merumuskan implikasi dan rekomendasi kebijakan strategis untuk penyusunan Renja PD Tahun 2026. Berikut adalah analisis terhadap program dan kegiatan berdasarkan tingkat capaian kerjanya:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Pada tahun 2024, terdapat satu program fundamental yang kerjanya belum berhasil mencapai target yang ditetapkan, yang berdampak pada pencapaian Sasaran Strategis terkait akuntabilitas.

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Realisasi Kinerja: Program ini mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Kinerja Sasaran Nilai / Predikat SAKIP. Realisasi kinerja hanya mencapai nilai 63,3 / Predikat "E", atau tidak memenuhi target 74 / Predikat "BB". Realisasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 9.325.932.844,00, atau 96,76% dari pagu sebesar Rp. 9.636.219.099,00.

2) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- a. Realisasi Kinerja
Program ini juga mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa. Indikator Kinerja Sasaran Persentase Bmdes

Berkembang mencapai realisasi 34%. Realisasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 1.229.296.910,00 atau 100% dari pagu sebesar Rp. 3.590.755.600.

b. Faktor-faktor Penyebab

Tidak tercapainya target pada kedua program ini memberikan implikasi yang signifikan. Kegagalan mencapai target SAKIP secara langsung menghambat pencapaian Sasaran Strategis Renstra "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" dan melemahkan kerangka pengukuran kinerja organisasi. Sementara itu, tidak tercapainya target Persentase BUMDes Berkembang menghambat laju pencapaian sasaran penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa.

c. Implikasi terhadap Target Capaian Program Renstra PD

Tidak tercapainya target pada kedua program ini memberikan implikasi yang signifikan. Kegagalan mencapai target SAKIP secara langsung menghambat pencapaian Sasaran Strategis Renstra "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" dan melemahkan kerangka pengukuran kinerja organisasi. Sementara itu, tidak tercapainya target Persentase BUMDes Berkembang menghambat laju pencapaian sasaran penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa.

d. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil

Menjadi prioritas utama pada Renja PD 2026 untuk mengalokasikan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik dan berdampak. Untuk SAKIP, perlu dianggarkan kegiatan pendampingan intensif (bukan hanya bimtek) terkait penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan yang tepat waktu. Untuk BUMDes, kebijakan penganggaran harus diarahkan pada kegiatan peningkatan kapasitas manajerial dan fasilitasi pengembangan usaha bagi BUMDes yang masih belum berada di kategori Persentase BUMDes Berkembang.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Beberapa program strategis berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja yang tepat sesuai dengan target 100%.

1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Realisasi Kinerja:** Program ini mendukung Sasaran Strategis: Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa. Indikator Kinerja Sasaran Persentase Keluhan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti mencapai realisasi

100%, atau memenuhi target 100%. Realisasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 21.351.668,00 atau 100% dari pagu sebesar Rp. 21.351.668,00.

2) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Realisasi Kinerja: Program ini mendukung Sasaran Strategis: *Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Indikator Kinerja Sasaran Persentase Desa yang memiliki Administrasi yang baik mencapai realisasi 100%, memenuhi target 100%. Realisasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 66.600.000,00 atau 100% dari pagu sebesar Rp. 66.600.000,00.

3) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- a. Realisasi Kinerja: Program ini mendukung Sasaran Strategis: *Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintahan Umum*. Indikator Kinerja Sasaran Persentase Keluhan Masyarakat terhadap Bantuan Sosial yang ditindaklanjuti mencapai realisasi 100%, memenuhi target 100%. Realisasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 59.106.470,00 atau 99,99% dari pagu sebesar Rp. 59.104.160,00.

4) Faktor-faktor Penyebab (untuk semua program yang memenuhi target)

Keberhasilan pencapaian target pada program-program ini didorong oleh beberapa faktor kunci. Secara spesifik, keberhasilan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sangat ditopang oleh implementasi inovasi MELONISTI (*Meja Layanan Kantor Kecamatan Iso Teko Bengi*). Inovasi ini memberikan alternatif waktu pelayanan di luar jam kerja (setiap hari Rabu malam), yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat pekerja yang tidak dapat mengakses layanan pada jam kerja biasa. Pendekatan proaktif ini terbukti efektif meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan masyarakat, sehingga meminimalkan potensi keluhan. Keberhasilan inovasi ini juga diapresiasi dengan diraihnya penghargaan 5 Besar dalam Lomba Kemitok Kabupaten Sitar Tahun 2025.

Sementara itu, keberhasilan pada program lainnya didukung oleh perencanaan yang matang, dukungan anggaran yang terdapat secara optimal, serta intensitas koordinasi dan pendampingan yang terjadwal dengan baik kepada pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya.

5) Implikasi terhadap Target Capaian Program Renstra PD

Tercapainya target-target ini secara langsung mendukung realisasi berbagai sasaran Renstra secara signifikan. Implementasi inovasi MELONISTI (*Mejo Layanan Kantor Kecamatan Iso Teko Bengi*) secara nyata memperkuat pencapaian Sasaran Strategis "Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa" dengan memberikan bukti konkret pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pada program pembinaan desa dan urusan pemerintahan umum menjadi fondasi penting bagi stabilitas, tata kelola yang baik, dan kemajuan wilayah secara keseluruhan.

6) Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil

Kebijakan untuk tahun 2026 adalah tidak hanya mempertahankan strategi yang telah berjalan efektif, tetapi juga mengembangkannya. Secara spesifik, perlu adanya alokasi anggaran khusus dalam Renja PD 2026 untuk pelembagaan dan keberlanjutan inovasi MELONISTI, mencakup biaya operasional dan sosialisasi agar jangkauannya semakin luas. Untuk program lainnya, fokusnya adalah menjaga konsistensi pelaksanaan program dengan memastikan alokasi anggaran yang tetap memadai, serta mulai merumuskan kegiatan lanjutan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Terdapat program yang menunjukkan kinerja target memuaskan dengan capaian melebihi target yang direncanakan.

1) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Realisasi Kinerja: Program ini mendukung Sasaran Strategis: Meningkatkan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintahan Umum. Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan mencapai realisasi 70%, atau melampaui target 73% (realisasi yang lebih rendah menunjukkan capaian yang lebih baik). Realisasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 13.693.000,00 atau 96,73% dari pagu sebesar Rp. 16.226.060,00.

2) Faktor-faktor Penyebab

Kinerja yang sangat baik ini didukung oleh sinergi yang kuat dan terjadwal antara Kecamatan, Polsek, dan Koramil dalam patroli terpadu dan deteksi

dini. Selain itu, keberhasilan inovasi RATU SEMUT (*Orang Tua Asuh Sinergi Menangani Stunting*) /Gerakan Terpadu Penanganan Stunting Terintegrasi yang meraih Juara 2 Kategori I Lomba Krenotek Kabupaten Blitar Tahun 2025, turut berkontribusi menekan potensi kerawanan sosial yang bersumber dari masalah kesejahteraan.

2) Implikasi terhadap Target Capaian Program Renstra PD

Tercapainya sasaran ini menciptakan kondisi stabilitas wilayah yang sangat kondusif dan melebihi ekspektasi, yang menjadi prasyarat utama bagi kelancaran seluruh program pembangunan lainnya.

3) Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Renja PD 2026

perlu dialokasikan anggaran untuk keberlanjutan dan penguatan inovasi RATU SEMUT (*Orang Tua Asuh Sinergi Menangani Stunting*) sebagai model penanganan masalah sosial yang terintegrasi, serta menjaga intensitas sinergi dengan aparat keamanan.

Berikut disajikan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025. Tabel ini menyajikan perbandingan komprehensif antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja dan serapan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel 5.1
 Deskripsi Struktur Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia (Bursa Efek Indonesia) 2021 untuk Investor
 Individu Retail

No.	Nama Bursa Efek Indonesia	Kategori Bursa Efek Indonesia	Nama Bursa Efek Indonesia	Nama Bursa Efek Indonesia	Indeks Bursa Efek Indonesia			Indeks Bursa Efek Indonesia	Indeks Bursa Efek Indonesia	
					Indeks Bursa Efek Indonesia	Indeks Bursa Efek Indonesia	Indeks Bursa Efek Indonesia		Indeks Bursa Efek Indonesia	Indeks Bursa Efek Indonesia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

[illegible]

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat keberhasilan Kecamatan Garum dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya pada tahun 2024, serta membandingkannya dengan target dan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel di bawah ini menyajikan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Garum secara komparatif, yang datanya bersumber dari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 dan dokumen Perbandingan Target Renstra, Target Perkin, dan Realisasinya. Data ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi kekuatan dan area yang memerlukan perbaikan dalam perencanaan tahun 2026.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Garum
Korupsi Bencor

No	INDIKATOR (KGI)	SPK/ Sasaran Kinerja	SKP	Target Rencana RPJPD				Realisasi Capaian		Target		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Pemeriksaan Balok dan Jarak antar balok terhadap Peraturan Perencanaan yang dikehendaki	-	-	100%	100%	100%	-	100%	-	100%	-	-
2	Nilai Perhitungan BENCOR	-	-	74,88	74,88	74,88	-	88,18	-	88	-	-
3	Pemeriksaan Bencor yang memiliki nilai maksimum yang lebih	-	-	100%	100%	100%	-	100%	-	100%	-	-
4	Pemeriksaan Bencor dan Bencor	-	-	41,33%	40%	41,33%	-	37,3%	-	38,33%	-	-
5	Pemeriksaan Perencanaan Densitas dan Perhitungan di Perumahan	-	-	70%	70%	70%	-	70%	-	70%	-	-
6	Pemeriksaan Balok dan Jarak antar balok terhadap Peraturan Perencanaan yang dikehendaki	-	-	100%	100%	100%	-	100%	-	100%	-	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, teridentifikasi beberapa isu penting dan strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Garum. Isu-isu ini tidak hanya mencerminkan capaian tahun 2024, tetapi juga menjadi catatan krusial yang akan menjadi landasan dalam perumusan program dan kegiatan prioritas untuk tahun 2026.

1. Tingkat Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis yang Terkait Secara umum, tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Garum pada tahun 2024

menunjukkan sebuah gambaran yang dualistik. Di satu sisi, kinerja pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat (pelayanan eksternal) menunjukkan capaian yang sangat memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya target penanganan keluhan 100% dan didukung oleh capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sangat tinggi. Di sisi lain, terdapat isu kritis pada kinerja internal yang menyangkut fondasi akuntabilitas dan efektivitas program. Hal ini tecermin dari dua kegagalan pencapaian target, yaitu pada Indikator Kinerja Standar Nilai SAKIP (realisasi 63,3 dari target 74) dan Persentase Bumdes Berkembang (realisasi 37,5% dari target 41,66%).

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dari analisis kinerja, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dan hambatan utama yang saling terkait:

- a) Kelemahan Sistem Akuntabilitas Kinerja: Permasalahan mendasar adalah belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rendahnya nilai SAKIP bukan sekedar angka, melainkan indikasi dari proses perencanaan dan pengukuran kinerja yang belum sepenuhnya terstruktur. Hambatan utamanya meliputi proses penjenjangan kinerja (*cascading*) dari level pimpinan hingga staf yang belum terimplementasi secara optimal, di mana sasaran strategis Camat belum terurai secara sistematis menjadi target kinerja yang jelas bagi setiap seksi dan individu. Selain itu, meskipun evaluasi internal sudah berjalan, proses pelaporan yang sering terlambat menunjukkan adanya kendala dalam disiplin dokumentasi dan manajemen waktu.
- b) Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Desa: Belum tercapainya target Persentase BUMDes Berkembang, meskipun programnya didukung penyerapan anggaran 100%, mengindikasikan bahwa intervensi yang dilakukan belum cukup untuk mendorong BUMDes naik kelas. Hambatannya bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan pada aspek-aspek non-fisik seperti kapasitas manajerial pengurus BUMDes, inovasi produk/jasa yang masih terbatas, dan strategi pemasaran yang belum optimal.
- c) Hambatan dari Sisi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia: Terdapat hambatan signifikan dari sisi kelembagaan, yaitu adanya 3 (tiga) posisi struktural yang kosong, meliputi Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Pelayanan Publik, serta Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan. Kekosongan pada

dua jabatan Kepala Sekti tersebut menciptakan risiko tinggi terhadap keberlanjutan program dan inovasi unggulan. Tanpa adanya pejabat definitif, kepemimpinan teknis pada program-program krusial seperti pelayanan publik (penanggung jawab Inovasi MELONISTI) dan kesejahteraan sosial (penanggung jawab Inovasi RATU SEMUT (*Orang Tua Asuh Sinergi Menangani Stunting*)) menjadi rentan dan berpotensi menghambat pengembangan di masa depan. Di sisi lain, kekosongan pada posisi Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan menunjukkan sebuah anomali yang unik. Meskipun jabatan ini sangat vital untuk siklus perencanaan dan penganggaran, namun faktanya seluruh proses mulai dari penyusunan, pelaksanaan, hingga pelaporan dapat tetap berjalan dengan efektif dan lancar. Hal ini justru menunjukkan adanya resiliensi dan kekuatan dalam sistem kerja yang sudah terbangun, di mana tugas dan fungsi dapat didelegasikan dan dilaksanakan dengan baik oleh staf yang ada. Meskipun demikian, kondisi ini tetap menjadi sebuah kekurangan dari sisi formalitas dan regenerasi kepemimpinan yang perlu segera diatasi untuk menjamin keberlanjutan sistem dalam jangka panjang.

3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Icu-icu tersebut memiliki dampak langsung terhadap pencapaian Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029:
 - a) Inovasi pelayanan publik seperti MELONISTI (*Meja Layanan Kantor Kecamatan Iso Teko Bengkulu*) secara positif mendukung pencapaian Misi ke-3, khususnya pada aspek "peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik".
 - b) Rendahnya Nilai SAKIP menjadi penghambat serius bagi pencapaian Misi ke-3 pada aspek "meningkatkan kinerja birokrasi yang akuntabel", karena akuntabilitas adalah prasyarat utama dari birokrasi yang berkinerja.
 - c) Belum optimalnya perkembangan BUMDes dan kekosongan jabatan Kepala Sekti Kesejahteraan Sosial berisiko menghambat kontribusi Kecamatan dalam mendukung Misi ke-1 (peningkatan kualitas SDM dan keluarga sejahtera) dan Misi ke-2 (pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi lokal).

4. Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan

a. Tantangan:

- 1) Internal: Tantangan terbesar adalah membangun budaya kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) untuk memperbaiki capaian SAKIP, bukan sekedar berorientasi pada penyerapan anggaran. Selain itu, tantangan signifikan lainnya adalah menjaga keberlanjutan inovasi di tengah kekotongan jabatan penanggung jawab.
- 2) Eksternal: Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang serba cepat dan digital menuntut adanya inovasi yang berkelanjutan, tidak hanya sesaat.

b. Peluang:

- 1) Pengakuan dan Potensi Replikasi Inovasi: Keberhasilan inovasi RATU SEMUT (*Orang Tua Asuh Sinergi Menangani Stunting*) sebagai Juara 2 dan MELONISTI (*Meja Layanan Kantor Kecamatan Iso Teko Bengi*) sebagai Juara 5 dalam Lomba KRENOTEK Kabupaten Bótar Tahun 2025 merupakan sebuah peluang emas. Prestasi ini menjadi justifikasi yang sangat kuat untuk mendapatkan dukungan (anggaran maupun kebijakan) yang lebih besar dari pemerintah kabupaten untuk pelembagaan dan replikasi inovasi tersebut.
 - 2) Momentum Arah Kebijakan Baru: Adanya RPJMD Kabupaten Bótar Tahun 2025-2029 yang baru memberikan landasan dan arah kebijakan yang baru pula bagi RKPD Tahun 2026 dan Renstra Kecamatan Garum periode 2025-2029. Momentum ini menjadi peluang bagi Kecamatan untuk menata ulang prioritas dalam Renja 2026 dan memperkuat sinergi program pemberdayaan ekonomi desa dengan Perangkat Daerah terkait untuk mengatasi masalah kapasitas BUMDes secara lebih komprehensif.
5. Formulasi Isu-isu Penting (Rekomendasi Strategis) Berdasarkan seluruh analisis di atas, dirumuskan tiga isu strategis utama yang harus menjadi fokus dalam penyusunan Renja PD 2026:

a. Penguatan Kapasitas Internal dan Pemberdayaan Eksternal

Terdapat dua area kelemahan yang harus segera diintervensi, yaitu:

- 1) Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal yang perlu diperbaiki secara fundamental, dan;
 - 2) Kapasitas Kelembagaan BUMDes yang memerlukan model pendampingan baru yang lebih fokus pada aspek manajerial dan pengembangan usaha.
- b. Pelembagaan dan Keberlanjutan Inovasi Unggulan: Keberhasilan inovasi SI IBU MUDA (*Sistem Informasi Buku Tamu Digital Di Kecamatan Garum*) harus ditindaklanjuti dengan kebijakan dan alokasi anggaran yang jelas dalam Renja 2026 untuk melembagakan, memelihara, dan mengembangkan kedua inovasi tersebut agar dampaknya berkelanjutan dan tidak bergantung pada individu semata.
- c. Optimalisasi dan Pemenuhan Struktur Organisasi: Perlu adanya percepatan pengisian kekosongan jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Pelayanan Publik, dan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan kepada pimpinan. Hal ini krusial untuk memastikan kepemimpinan teknis yang kuat dalam mengawal program-program prioritas dan keberlanjutan inovasi yang telah meraih prestasi.

2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 merupakan proses krusial untuk memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan antara perencanaan makro di tingkat kabupaten dengan perencanaan mikro yang berbasis pada kebutuhan nyata di tingkat Perangkat Daerah.

1. Proses yang Dilakukan

Proses review ini dilakukan melalui telaah dokumen (*desk analysis*) yang membandingkan dua sumber utama. Di satu sisi adalah dokumen RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026, yang menyajikan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta program dan pagu indikatif yang berifat makro dan mengikat (*top-down*). Di sisi lain adalah hasil analisis kebutuhan internal Kecamatan Garum, yang datanya digali dari hasil evaluasi kinerja tahun 2024 dan identifikasi isu-isu strategis yang telah diuraikan pada sub-bab 2.1, 2.2, dan 2.3 dalam dokumen ini (*bottom-up*).

2. Alasan Proses Dilakukan

Proses perbandingan ini dilakukan dengan beberapa alasan strategis:

a. Untuk Menjamin Sinkronisasi dan Sinergi

Memastikan bahwa rencana kerja yang akan disusun oleh Kecamatan Garum selaras dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dalam Ranwal RKPD.

b. Sebagai Dasar Justifikasi Usulan

Menjadi landasan argumentasi yang kuat dan berbasis data (*evidence-based*) bagi Kecamatan Garum dalam mengusulkan program, kegiatan, dan anggaran yang spesifik pada tahapan perencanaan selanjutnya (seperti Musrenbang RKPD). Usulan tidak lagi bersifat aspiratif semata, melainkan didasarkan pada analisis kesenjangan kinerja.

c. Untuk Meningkatkan Efektivitas Perencanaan

Memastikan bahwa Rencana Kerja (Renja) PD yang akan disusun bersifat realistis, relevan, dan mampu menjawab permasalahan paling krusial yang dihadapi oleh Kecamatan Garum.

3. Temuan-temuan dan Catatan Penting

Dari proses perbandingan, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Keselarasan Program

Becara umum, program-program yang tercantum dalam Ranwal RKPD, seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Program Pemberdayaan Masyarakat, telah selaras dengan tugas dan fungsi Kecamatan Garum. Pagu indikatif yang disajikan menjadi acuan awal dalam penyusunan plafon anggaran.

b. Perbedaan dan Kebutuhan Spesifik

Ranwal RKPD sebagai dokumen makro belum merinci kegiatan-kegiatan teknis yang dibutuhkan untuk mengatasi isu-isu spesifik di Kecamatan Garum. Oleh karena itu, ditemukan beberapa rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD namun sangat dibutuhkan berdasarkan hasil analisis, yaitu:

1) Kegiatan Penguatan Kapasitas SAKIP

Sebagai tindak lanjut langsung dari tidak tercapainya target Sasaran Strategis 2 (Akuntabilitas Kinerja).

2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajerial BUMDes

Sebagai intervensi untuk mengatasi tidak tercapainya target Secaraan Strategi 3 terkait Persentase Bumdes Berkembang.

3) **Kegiatan Keberlanjutan Inovasi Unggulan**

Diperlukan alokasi anggaran khusus untuk melembagakan dan mengembangkan inovasi MELONISTI (*Meja Layanan Kantor Kecamatan Iso Teko Bengli*) dan RATU SEMUT (*Orang Tua Asuh Sinergi Menangani Stunting*) yang telah terbukti berhasil dan meraih penghargaan, agar tidak berhenti sebagai proyek temporer.

Berdasarkan Uraian diatas, secara terperinci temuan-temuan ini dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Table 8.3
Median Salaries (in thousands) of Public School Teachers

No.	Kategori A (Rp 0-500)					Kategori B (Rp 500-1000)					Total
	Subkategori	Item	Detail	Unit	Value	Subkategori	Item	Detail	Unit	Value	
1	Produk Unggulan	Produk Unggulan	Produk Unggulan	100	100.000.000	Produk Unggulan	Produk Unggulan	Produk Unggulan	100	100.000.000	200
2	Produk Unggulan	Produk Unggulan	Produk Unggulan	100	100.000.000	Produk Unggulan	Produk Unggulan	Produk Unggulan	100	100.000.000	200
3	Produk Unggulan	Produk Unggulan	Produk Unggulan	100	100.000.000	Produk Unggulan	Produk Unggulan	Produk Unggulan	100	100.000.000	200
4	Produk Unggulan	Produk Unggulan	Produk Unggulan	100	100.000.000	Produk Unggulan	Produk Unggulan	Produk Unggulan	100	100.000.000	200
5	Produk Unggulan	Produk Unggulan	Produk Unggulan	100	100.000.000	Produk Unggulan	Produk Unggulan	Produk Unggulan	100	100.000.000	200
6	Produk Unggulan	Produk Unggulan	Produk Unggulan	100	100.000.000	Produk Unggulan	Produk Unggulan	Produk Unggulan	100	100.000.000	200
7	Produk Unggulan	Produk Unggulan	Produk Unggulan	100	100.000.000	Produk Unggulan	Produk Unggulan	Produk Unggulan	100	100.000.000	200

[illegible]

Nr.	KONTAKT MIT KUNDEN					KONTAKT MIT VERKÄUFERN					Zusätzliche Anmerkungen
	Pro Name, Telefonat	Wann	Wohin, Wozu	Wann	Wohin, Wozu	Pro Name, Telefonat	Wann	Wohin, Wozu	Wann	Wohin, Wozu	
		10.01.2020	10.01.2020	10.01.2020			10.01.2020	10.01.2020	10.01.2020		
		10.01.2020	10.01.2020	10.01.2020			10.01.2020	10.01.2020	10.01.2020		
11	Vertrieb, Kommunikation des Produktionsfortschritts 2020	10.01.2020	10.01.2020	10.01.2020	10.01.2020	Vertrieb, Kommunikation des Produktionsfortschritts 2020	10.01.2020	10.01.2020	10.01.2020	10.01.2020	

Wien 24. Januar 2020
Günter K. Schmid

LEONHARDT, A. & S. (Hrsg.)
ISSN 1875-0001 (Print) / 1875-0002 (Online)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sezuai dengan prinsip perencanaan partisipatif, penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan tahapan yang tidak terpisahkan dari penyusunan Rencana Kerja (Ranja) Perangkat Daerah. Bagian ini menyajikan hasil kajian terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk memastikan perencanaan bersifat responsif dan bottom-up.

1. Proses Perolehan Usulan Pemangku Kepentingan

a) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Usulan-usulan program dan kegiatan yang ditelaah dalam dokumen ini diperoleh secara formal melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 tingkat Kecamatan Garum. Acara ini telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, di Tempat Wisata Pantai Jolocutro, Desa Fingnrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Musrenbang tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari delapan desa di wilayah Kecamatan Garum, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, dan untuk lainnya yang daftar hadirnya terlampir dalam Berita Acara hasil kesepakatan. Setiap desa menyampaikan usulan prioritasnya yang kemudian diepakati bersama untuk diteruskan ke tingkat kabupaten.

b) Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar

Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kab. Blitar merupakan instrumen resmi dan sah bagi lembaga legislatif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun ke dalam proses perencanaan pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh eksekutif (Pemerintah Daerah). Mekanisme ini adalah wujud dari pendekatan perencanaan politis, di mana arah pembangunan daerah juga ditentukan oleh representasi politik masyarakat melalui wakil-wakilnya di DPRD.

Usulan-usulan ini merupakan hasil dari proses riset dan penjangkaran aspirasi yang dilakukan secara berkala oleh para anggota DPRD. Selama masa riset, setiap anggota dewan kembali ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing untuk bertatap muka langsung dengan konstituenya. Melalui berbagai forum seperti dialog, musyawarah, atau kunjungan langsung, mereka mengumpulkan

berbagai masukan, keluhan, dan usulan kebutuhan pembangunan dari masyarakat yang mereka wakili.

Setelah masa reses berakhir, seluruh aspirasi yang terhimpun tersebut kemudian dibawa kembali ke lembaga DPRD. Di sana, usulan-usulan tersebut dibahas, diverifikasi, dan dikompilasi menjadi sebuah dokumen yang utuh dan merepresentasikan pandangan kelembagaan DPRD. Dokumen inilah yang disebut sebagai Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Selanjutnya, dokumen Pokir ini secara resmi disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah (Bupati) dalam sebuah Rapat Paripurna. Penyerahan ini merupakan momen penting yang menandai masuknya aspirasi legislatif ke dalam ranah perencanaan eksekutif. Pemerintah Daerah, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bappedalitbang, kemudian wajib menelaah dan mengakomodasi usulan-usulan Pokir tersebut untuk dikelompokkan dengan prioritas, target, dan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai bukti bahwa proses ini telah dilaksanakan sesuai peraturan, usulan-usulan Pokir yang telah disepakati dan terverifikasi kemudian secara resmi diakomodasi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan daerah, yaitu dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026.

2. Penjelasan Kesesuaian Usulan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa mayoritas usulan prioritas, baik dari Musrenbang maupun Pokir DPRD, bernilai kegiatan pembangunan fisik dan pengadaan sarana prasarana. Secara kewenangan, eksekusi langsung atas kegiatan-kegiatan fisik tersebut berada pada Perangkat Daerah (PD) teknis terkait di tingkat Kabupaten.

Secara kewenangan, eksekusi langsung atas kegiatan-kegiatan fisik tersebut berada pada Perangkat Daerah (PD) teknis terkait di tingkat Kabupaten. Meskipun demikian, seluruh usulan tersebut memiliki kesesuaian dan keterkaitan yang erat dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Garum sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Peran Kecamatan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 adalah sebagai fasilitator, koordinator, dan pengawas dari usulan-usulan tersebut. Keterkaitan ini diwujudkan melalui berbagai program di Kecamatan:

- 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:**
Program ini menjadi fondasi bagi pelaksanaan seluruh fungsi fasilitasi dan koordinasi. Anggaran dalam program ini (seperti belanja ATK, perjalanan dinas untuk koordinasi, rapat-rapat, dan honorarium staf) memungkinkan aparat kecamatan untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam mengawal usulan Musrenbang. Tanpa dukungan program penunjang ini, kegiatan fasilitasi dan koordinasi pada program-program teknis lainnya tidak akan dapat berjalan secara efektif.
- 2) **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan:**
Program ini memiliki keterkaitan paling langsung dengan proses Musrenbang. Sesuai tugas dan fungsinya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan dan memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa. Oleh karena itu, seluruh usulan yang muncul dari Musrenbang merupakan output dari fasilitasi yang dilakukan melalui program ini.
- 3) **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa:**
Sebelum usulan dibawa ke Musrenbang Kecamatan, usulan tersebut harus masuk dalam dokumen perencanaan desa (RKPDDes). Program ini berperan dalam memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan administrasi tata pemerintahan desa, memastikan bahwa usulan-usulan tersebut memiliki landasan yuridis yang kuat di tingkat desa.
- 4) **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum:**
Setiap kegiatan pembangunan fisik (seperti pembangunan jembatan atau jalan) berpotensi menimbulkan dinamika sosial di masyarakat. Program ini berperan dalam mengawal dan memantau proses pelaksanaan pembangunan untuk memastikan berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, serta memitigasi potensi konflik sosial yang mungkin timbul.
- 5) **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik:**
Kecamatan akan berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan Perangkat Daerah teknis terkait, serta membantu dalam proses administrasi yang diperlukan untuk merealisasikan usulan tersebut, misalnya dalam hal verifikasi data calon penerima bantuan RTLM.
- 6) **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum:**
Usulan seperti "Rehab Tempat Ibadah" sangat relevan dengan program ini, di mana salah satu tugasnya adalah memfasilitasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun usulan masyarakat tidak menjadi kegiatan fisik dalam Renja Kecamatan, namun dukungan terhadap keberhasilan realisasi usulan tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh program yang relevan di Kecamatan Garum pada tahun 2026. Seluruh usulan tersebut memiliki korelasi dan keterkaitan yang erat dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Garum sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Peran Kecamatan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 adalah sebagai fasilitator, koordinator, dan pengawas dari usulan-usulan tersebut, yang diwujudkan melalui program-program yang ada di Kecamatan.

3. Daftar Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan 2026

Berikut adalah rekapitulasi usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan yang telah ditelaah dan akan difasilitasi serta dikawal oleh Kecamatan Garum:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Sumber: SKPD: Kecamatan Garum

No	Program/Kegiatan Usulan	Isi Usulan (Deskripsi/Detail)	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Estimasi (Rencana)/Asal Usulan/ OPD Tujuan Awal
Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan					
PPL: PEMBERATAN KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN & PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP					
1	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Pemeliharaan Jalan	Jalan Ruang Ringasan Sempai Degan Ruang Ringasan, Desa Ringaraja	Menerunnya tempo pemeliharaan jalan yang rusak	-	Desa Ringaraja/ Dinas Perhubungan
2	Pembangunan Saluran Drainase	Dusun Sidorjo RT 003 RW 002, Desa Sidorjo	Terdapatnya saluran air untuk pengaliran genangan	-	Desa Sidorjo/ Dinas PU dan Pemukiman Ruang
3	Pembangunan Talud Jalan/TPI	Dusun Sidorjo RT 02 RW 1, Desa Garum	Terdapatnya talud jalan dari lereng air hujan	-	Desa Garum/ Dinas PU dan Pemukiman Ruang
4	Pembangunan SPA II (sanden/ pempatan)	Jalan Angrok RT 01 RW 02 Dusun Bumbun, Desa Bumbun	Terdapatnya drainase air bersih saat musim kemarau	-	Desa Bumbun/ Dinas PU dan Pemukiman Ruang
5	Pembangunan Jalan	Desa Ngagaja RT 07 RW 02	Terdapatnya jalan sepanjang 130 m	130 m	Desa Ngagaja/ Dinas PU dan Pemukiman Ruang
PPL: PENINGKATAN KETAHANAN PASOK & PENGEBAHAN KILASAB PESTASAB					
6	Pembangunan Irigasi Air Tanah dangkal (Sumur Bor)	Dusun Tulungreja, Desa Tulungreja	Terdapatnya pasokan air untuk pertanian	1 unit	Desa Tulungreja/ Dinas Ketersediaan Pangan dan Pertanian
7	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Jalan Dusun Bumbun RT 01 RW 02, Desa Bumbun	Terdapatnya akses jalan menuju ladang petani	-	Desa Bumbun/ Dinas Ketersediaan Pangan dan Pertanian

No	Program/Kegiatan Dinas	Selesai (Daerah/Dinas)	Indikator Kinerja	Batasannya	Capaian (Ketersangan/Aspek Dinas/ OPD Tujuan Aspek)
1	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Jalan Timuran RT 04 RW 03 Dusun Sukono, Desa Sumboran	Terdapat akses jalan menuju lahan pertanian	-	Desa Sumboran / Dinas Keresahan Pangan dan Pertanian
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun Sukono RT 04 RW 03, Desa Gerum	Terdapat akses pertanian sepanjang 20 km	20 km	Desa Gerum / Dinas Keresahan Pangan dan Pertanian
12	Pembangunan Irigasi Air Tanah Bangsal (Dusun Baru)	Dusun Bangsal RT 01 RW 01, Desa Sukono	Terdapat sambungan air untuk pertanian	1 unit	Desa Sukono / Desa Keresahan Pangan dan Pertanian
PPS. PEMBERDAYAAN ANTRAKUT, PENGUATAN INDUSTRI & UMKM, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKOWISATA					
11	Desa Ekonomi Kreatif	Desa Sumboran	Meningkatnya kemampuan ekonomi kreatif masyarakat	-	Desa Sumboran / Dinas Keresahan dan Pariwisata
13	Peningkatan Kapasitas Petani dan Sumber Daya Manusia Sosial PMS	Desa Gerum	Terdapatnya uang kerjasama dari bagi rumah dan petani	-	Desa Gerum / Dinas Sosial
13	Desa Tata Kelola Pariwisata	Pekarya, Desa Ringorjo	Meningkatnya perataan tempat wisata	-	Desa Ringorjo / Dinas Ekowisata dan Pariwisata
14	Pelatihan Pengembangan Usaha Kerajinan/Wandana/Gelar	Dusun Tulungrejo, Desa Tulungrejo	Meningkatnya SDM kerajinan batik	-	Desa Tulungrejo/ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15	Pelatihan dan Pengembangan Wirausaha Petani	Desa Purnorejo	Meningkatnya SDM dalam mengolah	-	Desa Purnorejo / Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
PPS. PENGEMBANGAN SDG YANG INKLUSIF & PEMBERDAYAAN SOSIAL YANG ADAPTIF					
16	Pelatihan Kapasitas Lentera Pemberdayaan Keresahan	Dusun Sukono RT 006 RW 003, Desa Sukono	Meningkatnya kompetensi lentera keresahan	-	Desa Sukono / Dinas Keresahan
17	Bantuan Sosial Psikologi dan Perlingkapan Lingkungan Sosial	KOR Jember Maringgal, Desa Ringorjo	Meningkatnya kemampuan sosial	-	Desa Ringorjo / Dinas Sosial
18	Pelatihan Kapasitas Lentera Pemberdayaan Keresahan	Desa Sumboran	Meningkatnya SDM lentera keresahan	-	Desa Sumboran / Dinas Keresahan
19	PNT Lokal pada Balita	Desa Sumboran	Terdapat keresahan balita	-	Desa Sumboran / Dinas Keresahan
20	Sosialisasi Masyarakat tentang Bahaya-Makanan Berbahaya dalam Hikayat, Obat Tradisional dan Kecantikan	Dusun Sukono RT 006 RW 003, Desa Sukono	Meningkatnya pengertian tentang obat-obatan	-	Desa Sukono / Dinas Keresahan
PPS. PENGUATAN AKTIVITAS, AKTIVITAS UMKM, DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
21	Bimbingan Teknis Pengelolaan Aspek Desa	Dusun Sukono RT 05 RW 03, Desa Sukono	Terdapat badan masyarakat desa	-	Desa Sukono / Dinas Keresahan dan Masyarakat dan Desa
22	Pelatihan Implementasi Aplikasi SIRKANDI bagi Pemohon Desa	Desa Gerum	Terdapat aplikasi pelaporan SIRKANDI yang optimal	-	Desa Gerum / Dinas Penguatan dan Kemandirian
23	Pelatihan Digitalisasi Aspek Desa bagi Pengelola Aspek Tanah Desa	Desa Gerum	Terdapat dan terbaca aspek desa dengan baik	-	Desa Gerum / Dinas Penguatan dan Kemandirian
24	Bimbingan Teknis Pengelolaan Aspek Desa	Jalan Hardside No. 183, Desa Sumboran	Meningkatnya kualitas pengelolaan aspek desa	-	Desa Sumboran / Dinas Penguatan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan Sosial	Saluran (Desa/ Dusun)	Indikator Kinerja	Berkas/Volume	Catatan (Keterangan/Aspek Unsur/ OFD Tujuan Aspek)
26	Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Tempat Beribadah	Dusun Tulungrejo Desa Tulungrejo	Terdapatnya bangunan tempat ibadah yang rusak berat	-	Desa Tulungrejo/ Bagian Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PERA HILANG					
26	Bantuan Sosial Alat Bantu Alat Bantu Dongker	Desa Tugurejo	Terdapatnya alat bantu dongker untuk warga gangguan pendengaran	-	Desa Tugurejo/ Dinas Sosial
27	Pelatihan Pengolahan Pangan Beragam untuk Ibu Rumah Tangga	Desa Garut	Memerumahnya angka ekonomi	-	Desa Garut/ Dinas Kerehanan Pangan dan Pertanian
28	Pelatihan untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga Sosial Persepsi Masyarakat Pengusaha	Desa Sumbarenum	Mempercepat pemerataan persepsi untuk ekonomi	-	Desa Sumbarenum/ Dinas PP, PA, Pengendalian Penduduk, dan KB
29	Penerangan Pangan Beragam (PBB) (Buku)	Desa Sumbarenum	Terdapatnya informasi pangan dan gizi	-	Desa Sumbarenum/ Dinas Kerehanan Pangan dan Pertanian
30	Pelatihan untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga Sosial Persepsi Masyarakat Pengusaha	Desa Garut	Terdapatnya persepsi lokal (makan, pakai, pakai)	-	Desa Garut/ Dinas PP, PA, Pengendalian Penduduk, dan KB

Biker, 05 Agustus 2025

CAMAT GARUM

ARINAL HUDA, S.Pd., M.Si.

NIP. 19700501 199302 1 004

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memasuki tahun 2026, Kecamatan Garum berada dalam periode transisi perencanaan strategis. Tahun ini merupakan tahun kedua implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, yang mengurung Visi, Misi, dan arah kebijakan baru dari Kepala Daerah. Oleh karena itu, sesuai amanat peraturan perundangan, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2026 ini harus selaras dengan kerangka perencanaan jangka menengah yang baru tersebut, sebagaimana telah dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Garum Tahun 2025-2029.

Perumusan tujuan dan sasaran baru ini tidak meninggalkan hasil evaluasi dari periode sebelumnya. Sebaliknya, isu-isu strategis dan prioritas tindak lanjut yang telah diidentifikasi dalam Bab II terutama target-target yang belum tercapai pada tahun 2024 tetap menjadi fokus utama dan kini diintegrasikan ke dalam kerangka sasaran yang baru untuk memastikan adanya kesinambungan dan penyelesaian masalah secara tuntas.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Garum Tahun 2026 tidak terlepas dari kerangka kebijakan pembangunan yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Telaahan terhadap kebijakan nasional ini bertujuan untuk memastikan adanya sinergi dan keselarasan antara program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat kecamatan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026, terdapat beberapa agenda dan prioritas pembangunan nasional yang relevan dan harus didukung oleh penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Garum, antara lain:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Prioritas nasional ini mencakup upaya percepatan penurunan stunting, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, serta pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem.

✦ Keterkaitan dengan Kecamatan Garum

Kecamatan Garum secara langsung mendukung prioritas ini melalui program-program yang dikoordinasikan oleh Seksi Kesejahteraan Sosial, terutama melalui inovasi RATU SEMUT (*Orang Tua Asuh Sinergi Menangani Stunting*) Gerakan Terpadu Penanganan Stunting Terintegrasi. Inovasi ini merupakan implementasi nyata dari kebijakan nasional di tingkat lokal.

2. Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Kebijakan ini menekankan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa.

✦ Keterkaitan dengan Kecamatan Garum:

Kecamatan Garum berkontribusi melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang salah satu fokusnya adalah pendampingan dan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

3. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Agenda nasional ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

✦ Keterkaitan dengan Kecamatan Garum:

Kecamatan Garum menjawab agenda ini melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Keberhasilan inovasi MELONISTI (*Meja Layanan Kantor Kecamatan Iso Teko Bengi*) merupakan salah satu bentuk dukungan nyata terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, isu terkait rendahnya capaian SAKIP menjadi catatan bahwa aspek akuntabilitas dalam reformasi birokrasi masih perlu menjadi fokus perbaikan.

Dengan demikian, program dan kegiatan yang akan dirumuskan dalam Renja PD Kecamatan Garum Tahun 2026 telah diarahkan untuk mendukung dan menyelesaikan pencapaian prioritas-prioritas pembangunan nasional tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Garum Tahun 2026 didasarkan pada hasil analisis dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya serta ditelaraskan dengan sasaran strategis jangka menengah yang baru. Berdasarkan isu-isu penting yang telah diidentifikasi pada Bab II, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Renja PD untuk tahun 2026 yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Garum Tahun 2025-2029.

Tujuan Renja PD Tahun 2026

Sesuai dengan Tujuan Renstra 2025-2029, tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2026 adalah:

1. Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik

Indikator Tujuan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)

Sasaran Renja PD Tahun 2026: Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan menjadi fokus pada tahun 2026:

1) Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan

Indikator Sasaran

Persentase Desa Mandiri (%)

Sasaran ini ditetapkan untuk menindaklanjuti dan meningkatkan program pembinaan dan pemberdayaan desa yang telah berjalan, dengan fokus untuk mendorong desa naik status dari berkembang menjadi mandiri. Pada Sasaran ini secara langsung menindaklanjuti isu strategis belum tercapainya target "Persentase Bumdes Berkembang". Upaya peningkatan kapasitas BUMDes kini menjadi sub-strategi fundamental untuk membangun pilar ketahanan ekonomi desa, yang merupakan syarat untuk mencapai status Desa Mandiri.

2) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Indikator Sasaran

Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan (%)

Sasaran ini merupakan kelanjutan dari kinerja baik pada tahun sebelumnya dalam menjaga stabilitas wilayah, dengan tolok ukur yang lebih spesifik pada penurunan angka kriminalitas, sasaran ini

merupakan keberlanjutan dan penguatan dari kinerja baik yang telah dicapai pada tahun 2024 dalam menjaga stabilitas wilayah, dengan tolok ukur yang lebih tajam dan berorientasi pada dampak (outcome).

3) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD

Indikator Sasaran:

SKOR SAKIP (Nilai)

Sasaran ini secara eksplisit meneruskan prioritas tindak lanjut dari isu strategis utama tahun 2024, yaitu tidak tercapainya target Nilai SAKIP. Ini menunjukkan komitmen kuat untuk melakukan perbaikan fundamental pada sistem manajemen kinerja internal.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada sub-bab sebelumnya, maka dirumuskanlah serangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gerum pada Tahun Anggaran 2026. Sebagai wujud adaptasi terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah yang baru dan amanat dari Rancangan Awal Renstra 2025-2029, pada Rencana Kerja Tahun 2026 ini terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan baru yang dirancang secara spesifik untuk mengakselerasi pencapaian sasaran-sasaran strategis yang baru. Rincian mengenai latar belakang dan tujuan dari kegiatan baru tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada Bab IV.

1. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Perumusan program dan kegiatan ini didasarkan pada beberapa faktor pertimbangan strategis untuk memastikan relevansi dan dampaknya, antara lain:

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah: Seluruh program dan kegiatan dirancang sebagai penjabaran tahunan dari Draft Rancangan Awal Renstra 2025-2029, yang bertujuan untuk mendukung pencapaian Visi "KABUPATEN ELITAR BERDAYA DAN BERJAYA" dan Misi-Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029.

b. Dukungan terhadap Prioritas Nasional dan Daerah: Program dirancang untuk selaras dengan prioritas nasional dan daerah, seperti:

1) Penanganan Stunting dan Peningkatan Ketahanan Pangan: Diwujudkan melalui sub kegiatan baru yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang menargetkan 150 keluarga.

- 2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Diakomodasi melalui sub kegiatan baru Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan.
 - 3) Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pelayanan: Diterjemahkan dalam sub kegiatan baru Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dan Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektorial Daerah.
- c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja: Perumusan kegiatan juga merupakan respons langsung terhadap hasil evaluasi kinerja tahun 2024 (sebagaimana dianalisis di Bab II), terutama untuk menindaklanjuti target-target yang belum tercapai seperti peningkatan Skor SAKIP dan pengembangan BUMDes.
2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan Secara keseluruhan, Rencana Kerja Kecamatan Garum Tahun 2026 terdiri dari 6 Program, 15 Kegiatan, dan 36 Sub Kegiatan.
 - a) Sifat Penyebaran Lokasi: Sifat penyebaran lokasi kegiatan bervariasi. Sebagian besar kegiatan yang bersifat administratif, koordinatif, dan pembinaan (seperti fasilitasi penyusunan peraturan desa) tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Garum untuk menjamin pemerataan. Namun, terdapat pula kegiatan yang terfokus pada kelompok sasaran tertentu, seperti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang akan menjangkau 150 keluarga spesifik di lokasi-lokasi yang telah ditentukan.
 - b) Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif: Total kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Kecamatan Garum pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 2.246.746.660,00. Sumber pendanaan untuk seluruh kegiatan ini berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).
 3. Penjelasan Kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Perumusan 6 program dalam Renja PD ini telah selaras dengan program-program yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026 (Perbup No. 73 Tahun 2025). Namun, rincian kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan, terutama yang bersifat baru seperti Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, merupakan hasil dari analisis kebutuhan spesifik Kecamatan Garum. Usulan-usulan baru ini tidak dirinci dalam dokumen RKPD yang bersifat makro, namun sangat esensial untuk menerjemahkan arah kebijakan baru dari Renstra 2025-2029 dan menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Rincian lengkap mengenai rumusan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Target, Lokasi, Pagu Indikatif, serta Prakiraan Maju untuk tahun 2027 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Table 2.1
Maximum Monthly Program Gas Injection Requirements During 2005 and Maximum 1999 Injection Rate
for the 1200 MW Unit
Injection Rate (MMSCFD) 1999
Injection Rate (MMSCFD) 2005

Sl. No.	Date	Particulars	Debit		Credit		Balance
			Rs.	Paise	Rs.	Paise	
1	2019-01-01	Opening Balance			1000	00	1000-00
2	2019-01-05	Received from Mr. X	500	00			1500-00
3	2019-01-10	Paid to Mr. Y	200	00			1300-00
4	2019-01-15	Received from Mr. Z	300	00			1600-00
5	2019-01-20	Paid to Mr. A	100	00			1500-00
6	2019-01-25	Received from Mr. B	400	00			1900-00
7	2019-02-01	Paid to Mr. C	150	00			1750-00
8	2019-02-05	Received from Mr. D	250	00			2000-00
9	2019-02-10	Paid to Mr. E	100	00			1900-00
10	2019-02-15	Received from Mr. F	350	00			2250-00
11	2019-02-20	Paid to Mr. G	120	00			2130-00
12	2019-02-25	Received from Mr. H	280	00			2410-00
13	2019-03-01	Paid to Mr. I	180	00			2230-00
14	2019-03-05	Received from Mr. J	320	00			2550-00
15	2019-03-10	Paid to Mr. K	140	00			2410-00
16	2019-03-15	Received from Mr. L	260	00			2670-00
17	2019-03-20	Paid to Mr. M	110	00			2560-00
18	2019-03-25	Received from Mr. N	310	00			2870-00
19	2019-04-01	Paid to Mr. O	160	00			2710-00
20	2019-04-05	Received from Mr. P	290	00			3000-00
21	2019-04-10	Paid to Mr. Q	130	00			2870-00
22	2019-04-15	Received from Mr. R	330	00			3200-00
23	2019-04-20	Paid to Mr. S	170	00			3030-00
24	2019-04-25	Received from Mr. T	270	00			3300-00
25	2019-05-01	Paid to Mr. U	190	00			3110-00
26	2019-05-05	Received from Mr. V	300	00			3410-00
27	2019-05-10	Paid to Mr. W	150	00			3260-00
28	2019-05-15	Received from Mr. X	280	00			3540-00
29	2019-05-20	Paid to Mr. Y	120	00			3420-00
30	2019-05-25	Received from Mr. Z	340	00			3760-00
31	2019-06-01	Paid to Mr. A	180	00			3580-00
32	2019-06-05	Received from Mr. B	310	00			3890-00
33	2019-06-10	Paid to Mr. C	140	00			3750-00
34	2019-06-15	Received from Mr. D	290	00			4040-00
35	2019-06-20	Paid to Mr. E	160	00			3880-00
36	2019-06-25	Received from Mr. F	320	00			4200-00
37	2019-07-01	Paid to Mr. G	130	00			4070-00
38	2019-07-05	Received from Mr. H	270	00			4340-00
39	2019-07-10	Paid to Mr. I	170	00			4170-00
40	2019-07-15	Received from Mr. J	300	00			4470-00
41	2019-07-20	Paid to Mr. K	150	00			4320-00
42	2019-07-25	Received from Mr. L	280	00			4600-00
43	2019-08-01	Paid to Mr. M	190	00			4410-00
44	2019-08-05	Received from Mr. N	330	00			4740-00
45	2019-08-10	Paid to Mr. O	160	00			4580-00
46	2019-08-15	Received from Mr. P	290	00			4870-00
47	2019-08-20	Paid to Mr. Q	140	00			4730-00
48	2019-08-25	Received from Mr. R	310	00			5040-00
49	2019-09-01	Paid to Mr. S					

Item	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
1	kg	100	1.20	120.00	Material A
2	m	50	2.50	125.00	Material B
3	kg	200	0.80	160.00	Material C
4	m	75	1.60	120.00	Material D
5	kg	150	1.00	150.00	Material E
6	m	30	4.00	120.00	Material F
7	kg	80	1.50	120.00	Material G
8	m	60	2.00	120.00	Material H
9	kg	120	1.00	120.00	Material I
10	m	40	3.00	120.00	Material J
11	kg	90	1.30	117.00	Material K
12	m	20	6.00	120.00	Material L
13	kg	110	1.10	121.00	Material M
14	m	55	2.20	121.00	Material N
15	kg	70	1.70	119.00	Material O
16	m	35	3.50	122.50	Material P
17	kg	105	1.15	120.75	Material Q
18	m	25	4.80	120.00	Material R
19	kg	135	0.90	121.50	Material S
20	m	65	1.80	117.00	Material T
21	kg	85	1.40	119.00	Material U
22	m	45	2.70	121.50	Material V
23	kg	115	1.05	120.75	Material W
24	m	30	4.00	120.00	Material X
25	kg	95	1.25	118.75	Material Y
26	m	20	6.00	120.00	Material Z
27	kg	125	0.95	118.75	Material AA
28	m	50	2.40	120.00	Material AB
29	kg	75	1.60	120.00	Material AC
30	m	35	3.40	119.00	Material AD
31	kg	100	1.20	120.00	Material AE
32	m	25	4.80	120.00	Material AF
33	kg	130	0.90	117.00	Material AG
34	m	60	2.00	120.00	Material AH
35	kg	80	1.50	120.00	Material AI
36	m	40	3.00	120.00	Material AJ
37	kg	90	1.30	117.00	Material AK
38	m	20	6.00	120.00	Material AL
39	kg	110	1.10	121.00	Material AM
40	m	55	2.20	121.00	Material AN
41	kg	70	1.70	119.00	Material AO
42	m	35	3.50	122.50	Material AP
43	kg	105	1.15	120.75	Material AQ
44	m	25	4.80	120.00	Material AR
45	kg	135	0.90	121.50	Material AS
46	m	65	1.80	117.00	Material AT
47	kg	85	1.40	119.00	Material AU
48	m	45	2.70	121.50	Material AV
49	kg	115	1.05	120.75	Material AW
50	m	30	4.00	120.00	Material AX
51	kg	95	1.25	118.75	Material AY
52	m	20	6.00	120.00	Material AZ
53	kg	125	0.95	118.75	Material BA
54	m	50	2.40	120.00	Material BB
55	kg	75	1.60	120.00	Material BC
56	m	35	3.40	119.00	Material BD
57	kg	100	1.20	120.00	Material BE
58	m	25	4.80	120.00	Material BF
59	kg	130	0.90	117.00	Material BG
60	m	60	2.00	120.00	Material BH
61	kg	80	1.50	120.00	Material BI
62	m	40	3.00	120.00	Material BJ
63	kg	90	1.30	117.00	Material BK
64	m	20	6.00	120.00	Material BL
65	kg	110	1.10	121.00	Material BM
66	m	55	2.20	121.00	Material BN
67	kg	70	1.70	119.00	Material BO
68	m	35	3.50	122.50	Material BP
69	kg	105	1.15	120.75	Material BQ
70	m	25	4.80	120.00	Material BR
71	kg	135	0.90	121.50	Material BS
72	m	65	1.80	117.00	Material BT
73	kg	85	1.40	119.00	Material BU
74	m	45	2.70	121.50	Material BV
75	kg	115	1.05	120.75	Material BW
76	m	30	4.00	120.00	Material BX
77	kg	95	1.25	118.75	Material BY
78	m	20	6.00	120.00	Material BZ
79	kg	125	0.95	118.75	Material CA
80	m	50	2.40	120.00	Material CB
81	kg	75	1.60	120.00	Material CC
82	m	35	3.40	119.00	Material CD
83	kg	100	1.20	120.00	Material CE
84	m	25	4.80	120.00	Material CF
85	kg	130	0.90	117.00	Material CG
86	m	60	2.00	120.00	Material CH
87	kg	80	1.50	120.00	Material CI
88	m	40	3.00	120.00	Material CJ
89	kg	90	1.30	117.00	Material CK
90	m	20	6.00	120.00	Material CL
91	kg	110	1.10	121.00	Material CM
92	m	55	2.20	121.00	Material CN
93	kg	70	1.70	119.00	Material CO
94	m	35	3.50	122.50	Material CP
95	kg	105	1.15	120.75	Material CQ
96	m	25	4.80	120.00	Material CR
97	kg	135	0.90	121.50	Material CS
98	m	65	1.80	117.00	Material CT
99	kg	85	1.40	119.00	Material CU
100	m	45	2.70	121.50	Material CV
101	kg	115	1.05	120.75	Material CW
102	m	30	4.00	120.00	Material CX
103	kg	95	1.25	118.75	Material CY
104	m	20	6.00	120.00	Material CZ
105	kg	125	0.95	118.75	Material DA
106	m	50	2.40	120.00	Material DB
107	kg	75	1.60	120.00	Material DC
108	m	35	3.40	119.00	Material DD
109	kg	100	1.20	120.00	Material DE
110	m	25	4.80	120.00	Material DF
111	kg	130	0.90	117.00	Material DG
112	m	60	2.00	120.00	Material DH
113	kg	80	1.50	120.00	Material DI
114	m	40	3.00	120.00	Material DJ
115	kg	90	1.30	117.00	Material DK
116	m	20	6.00	120.00	Material DL
117	kg	110	1.10	121.00	Material DM
118	m	55	2.20	121.00	Material DN
119	kg	70	1.70	119.00	Material DO
120	m	35	3.50	122.50	Material DP
121	kg	105	1.15	120.75	Material DQ
122	m	25	4.80	120.00	Material DR
123	kg	135	0.90	121.50	Material DS
124	m	65	1.80	117.00	Material DT
125	kg	85	1.40	119.00	Material DU
126	m	45	2.70	121.50	Material DV
127	kg	115	1.05	120.75	Material DW
128	m	30	4.00	120.00	Material DX
129	kg	95	1.25	118.75	Material DY
130	m	20	6.00	120.00	Material DZ
131	kg	125	0.95	118.75	Material EA
132	m	50	2.40	120.00	Material EB
133	kg	75	1.60	120.00	Material EC
134	m	35	3.40	119.00	Material ED
135	kg	100	1.20	120.00	Material EE
136	m	25	4.80	120.00	Material EF
137	kg	130	0.90	117.00	Material EG
138	m	60	2.00	120.00	Material EH
139	kg	80	1.50	120.00	Material EI
140	m	40	3.00	120.00	Material EJ
141	kg	90	1.30	117.00	Material EK
142	m	20	6.00	120.00	Material EL
143	kg	110	1.10	121.00	Material EM
144	m	55	2.20	121.00	Material EN
145	kg	70	1.70	119.00	Material EO
146	m	35	3.50	122.50	Material EP
147	kg	105	1.15	120.75	Material EQ
148	m	25	4.80	120.00	Material ER
149	kg	135	0.90	121.50	Material ES
150	m	65	1.80	117.00	Material ET
151	kg	85	1.40	119.00	Material EU
152	m	45	2.70	121.50	Material EV
153	kg	115	1.05	120.75	Material EW
154	m	30	4.00	120.00	Material EX
155	kg	95	1.25	118.75	Material EY
156	m	20	6.00	120.00	Material EZ
157	kg	125	0.95	118.75	Material FA
158	m	50	2.40	120.00	Material FB
159	kg	75	1.60	120.00	Material FC
160	m	35	3.40	119.00	Material FD
161	kg	100	1.20	120.00	Material FE
162	m	25	4.80	120.00	Material FF
163	kg	130	0.90	117.00	Material FG
164	m	60	2.00	120.00	Material FH
165	kg	80	1.50	120.00	Material FI
166	m	40	3.00	120.00	Material FJ
167	kg	90	1.30	117.00	Material FK
168	m	20	6.00	120.00	Material FL
169	kg	110	1.10	121.00	Material FM
170	m	55	2.20	121.00	Material FN
171	kg	70	1.70	119.00	Material FO
172	m	35	3.50	122.50	Material FP
173	kg	105	1.15	120.75	Material FQ
174	m	25	4.80	120.00	Material FR
175	kg	135	0.90	121.50	Material FS
176	m	65	1.80	117.00	Material FT
177	kg	85	1.40	119.00	Material FU
178	m	45	2.70	121.50	Material FV
179	kg	115	1.05	120.75	Material FW
180	m	30	4.00	120.00	Material FX
181	kg	95	1.25	118.75	Material FY
182	m	20	6.00	120.00	Material FZ
183	kg	125	0.95	118.75	Material GA
184	m	50	2.40	120.00	Material GB
185	kg	75	1.60	120.00	Material GC
186	m	35	3.40	119.00	Material GD
187	kg	100	1.20	120.00	Material GE
188	m	25	4.80	120.00	Material GF
189	kg	130	0.90	117.00	Material GG
190	m	60	2.00	120.00	Material GH
191	kg	80	1.50	120.00	Material GI
192	m	40	3.00	120.00	Material GJ
193	kg	90	1.30	117.00	Material GK
194	m	20	6.00	120.00	Material GL
195	kg	110	1.10	121.00	Material GM
196	m	55	2.20	121.00	Material GN
197	kg	70	1.70	119.00	Material GO
198	m	35	3.50	122.50	Material GP
199	kg	105	1.15	120.75	Material GQ
200	m	25	4.80	120.00	Material GR
201	kg	135	0.90	121.50	Material GS
202	m	65	1.80	117.00	Material GT
203	kg	85	1.40	119.00	Material GU
204	m	45	2.70	121.50	Material GV
205	kg	115	1.05	120.75	Material GW
206	m	30	4.00	120.00	Material GX
207	kg	95	1.25	118.75	Material GY
208	m	20	6.00	120.00	Material GZ
209	kg	125	0.95	118.75	Material HA
210	m	50	2.40	120.00	Material HB
211	kg	75	1.60	120.00	Material HC
212	m	35	3.40	119.00	Material HD
213	kg	100	1.20	120.00	Material HE
214	m	25	4.80	120.00	Material HF
215	kg	130	0.90	117.00	Material HG
216	m	60	2.00	120.00	Material HH
217	kg	80	1.50	120.00	Material HI
218	m	40	3.00	120.00	Material HJ
219	kg	90	1.30	117.00	Material HK
220	m	20	6.00	120.00	Material HL
221	kg	110	1.10	121.00	Material HM
222	m	55	2.20	121.00	Material HN
223	kg	70	1.70	119.00	Material HO
224	m	35	3.50	122.50	Material HP
225	kg	105	1.15	120.75	Material HQ
226	m	25	4.80	120.00	Material HR
227	kg	135	0.90	121.50	Material HS
228	m	65	1.80	117.00	Material HT
229	kg	85	1.40	119.00	Material HU
230	m	45	2.70	121.50	Material HV
231	kg	115	1.05	120.75	Material HW
232	m	30	4.00	120.00	Material HX
233	kg	95	1.25	118.75	Material HY
234	m	20	6.00	120.00	Material HZ
235	kg	125	0.95	118.75	Material IA
236	m	50	2.40	120.00	Material IB
237	kg	75	1.60	120.00	Material IC
238	m	35	3.40	119.00	Material ID
239	kg	100	1.20	120.00	Material IE
240	m	25	4.80	120.00	Material IF
24					

No	Date	Particulars	Debit	Credit	Balance	Particulars						Debit	Credit	Balance
						Particulars	Debit	Credit	Balance	Particulars	Debit	Credit	Balance	

Signature of the Officer

Signature

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Garum untuk Tahun Anggaran 2026. Uraian pada bab ini merupakan penjabaran yang lebih detail dari rumusan rencana program dan kegiatan yang telah disajikan pada Bab III, dan sepenuhnya selaras dengan data final yang telah diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana tercantum dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Garum Tahun 2026.

Total alokasi pagu indikatif untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Kecamatan Garum pada tahun 2026 adalah sebesar 6.796.741.762,97. Alokasi dana tersebut didistribusikan ke dalam 6 (enam) program utama. Berikut adalah rincian penjabarannya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Pagu Anggaran Program Rp 6.139.813.631,97.

Program ini menjadi fondasi operasional bagi seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Secara strategis, program ini akan diarahkan untuk mendukung pencapaian *Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*, dengan Indikator Sasaran: *Skor SAKIP*, dengan target Nilai/ Skor 67

- b. Sub Kegiatan Baru: Dalam program ini, terdapat dua sub kegiatan baru yang ditambahkan pada tahun 2026 untuk memperkuat tata kelola data dan implementasi teknologi informasi, yaitu *Sub Kegiatan Penyelenggaraan Wahdafa Pendukung Statistik Sektorial Daerah* untuk meningkatkan kualitas data perencanaan, dan *Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* sebagai wujud dukungan terhadap reformasi birokrasi digital.

c. Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Pagu: Rp 4.115.700,00)
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Target: 7 Dokumen.
Pagu: Rp 1.900.200,00.
 - b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Target: 6 Laporan.
Pagu: Rp 2.215.500,00.
- 2) Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pagu: Rp 14.469.570.232,00
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.
Target: 31 Orang/Bulan.
Pagu: Rp 4.469.570.232,00.
- 3) Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Pagu: Rp 130.290.000,00
 - a) Sub Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Indikator: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
Target: 12 Dokumen.
Pagu: Rp 130.290.000,00.
- 4) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Pagu: Rp 2.222.400,00.
 - a) Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.

Target: 4 Paket.

Pagu: Rp 2.283.000,00.

b) *Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.*

Indikator: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

Target: 20 Paket.

Pagu: Rp 17.504.280,00.

c) *Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.*

Indikator: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.

Target: 5 Paket.

Pagu: Rp 1.194.000,00

d) *Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor.*

Indikator: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.

Target: 5 Paket.

Pagu: Rp 5.093.800,00

e) *Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.*

Indikator: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.

Target: 12 Paket.

Pagu: Rp 7.510.000,00

f) *Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.*

Indikator: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Target: 12 Laporan.

Pagu: Rp 77.010.000,00.

g) *Sub Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.*

Indikator: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Target: 1 Dokumen.

Pagu: Rp 1.350.000,00.

- 5) Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu: Rp 57.027.100,00.

- a) Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel

Indikator: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan.

Target: 1 Unit.

Pagu: Rp 10.578.800,00.

- b) Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.

Target: 5 Unit.

Pagu: Rp 46.448.300,00.

- 6) Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu: Rp 71.536.000,00.

- a) Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

Target: 12 Laporan.

Pagu: Rp 13.600.000,00.

- b) Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

Target: 12 Laporan.

Pagu: Rp 57.936.000,00.

- 7) Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu: Rp 98.519.620,00.

- a) *Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.*

Indikator: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

Target: 12 Laporan.

Pagu: Rp 55.410.000,00.

- b) *Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*

Indikator: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.

Target: 6 Unit.

Pagu: Rp 4.300.000,00.

- c) *Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.*

Indikator: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

Target: 1 Unit.

Pagu: Rp 38.809.620,00.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. **Pagu Anggaran Program Rp 23.960.000,00.**

Program ini secara langsung bertujuan untuk mendukung Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD, dengan Indikator Sasaran: Skor SAKIP, dengan target Nilai / Skor 67.

- b. **Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan:**

- 1) **Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

Pagu: Rp 9.460.000,00

- a) *Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.*

Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

Target: 8 Laporan.

Pagu: Rp 9.460.000,00.

- 2) Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Pagu: Rp 8.340.000,00

- a) Sub Kegiatan: *Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*

Indikator: Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan.

Target: 12 Laporan.

Pagu: Rp 8.340.000,00.

- 3) Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Pagu: Rp 6.160.000,00

- a) Sub Kegiatan: *Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*

Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

Target: 12 Laporan.

Pagu: Rp 6.160.000,00.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Pagu Anggaran Program Rp 104.062.200,00.

Program ini secara spesifik dirancang untuk mendukung pencapaian Sasaran: *Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan*, dengan indikator sasaran *Persentase Desa Mandiri*, dengan target 37,5%.

- b. Kegiatan Baru: Untuk mengakselerasi pencapaian kemandirian desa, ditambahkan *Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga* dengan 5 sub kegiatan baru yang berfokus pada ketahanan pangan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, hingga mitigasi bencana di tingkat keluarga.

- c. Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan:

- 1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pagu Rp 31.472.200,00

- a) *Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.*

Indikator: Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

Target: 12 Laporan.

Pagu: Rp 17.892.200,00.

- b) *Sub Kegiatan: Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan.*

Indikator: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan.

Target: 3 Dokumen.

Pagu: Rp 9.080.000,00.

- c) *Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.*

Indikator: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Target: 4 Laporan.

Pagu: Rp 4.500.000,00.

- 2) *Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*

Pagu: Rp 72.590.000,00

- a) *Sub Kegiatan: Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.*

Indikator: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.

Target: 150 Keluarga.

Pagu: Rp 61.790.000,00.

- b) *Sub Kegiatan: Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.*

Indikator: Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Target: 30 Keluarga.

Pagu: Rp 2.700.000,00.

- c) *Sub Kegiatan: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya.*

Indikator: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya.

Target: 30 Keluarga.

Pagu: Rp 2.700.000,00.

- d) *Sub Kegiatan: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup.*

Indikator: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup.

Target: 30 Keluarga.

Pagu: Rp 2.700.000,00.

- e) *Sub Kegiatan: Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam.*

Indikator: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam.

Target: 30 Keluarga.

Pagu: Rp 2.700.000,00.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Pagu Anggaran Program: Rp 37.500.000,00.

Program ini juga berkontribusi langsung pada pencapaian

Sasaran: *Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan, dengan indikator sasaran Persentase Desa Mandiri, dengan target 37,5%.*

b. Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan:

- 1) Kegiatan: *Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*

Pagu: Rp 37.500.000,00

- a) *Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.*

Indikator: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Target: 16 Dokumen.

Pagu: Rp 13.620.000,00.

- b) *Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.*

Indikator: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Target: 16 Dokumen.

Pagu: Rp 5.260.000,00.

- c) *Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.*

Indikator: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

Target: 8 Dokumen.

Pagu: Rp 5.260.000,00.

- d) *Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.*

Indikator: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Target: 8 Dokumen.

Pagu: Rp 5.260.000,00.

- e) *Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.*

Indikator: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Target: 4 Dokumen.
Pagu: Rp 2.700.000,00.

- f) Sub Kegiatan: *Fasilitasi Pengusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.*

Indikator: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
Target: 8 Dokumen.
Pagu: Rp 2.700.000,00.

- g) Sub Kegiatan: *Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.*

Indikator: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
Target: 1 Dokumen.
Pagu: Rp 2.700.000,00.

5. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. **Pagu Anggaran Program:** Rp 16.615.000,00.

Program ini bertujuan untuk mencapai Sasaran: *Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum*, dengan indikator sasaran *Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan*, dengan target 7%

- b. **Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan:**

- 1) Kegiatan: *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*

Pagu: Rp 10.600.000,00

- a) Sub Kegiatan: *Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*

Indikator: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

Target: 6 Laporan.
Pagu: Rp 4.500.000,00.

- b) *Sub Kegiatan: Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*

Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Target: 4 Laporan.

Pagu: Rp 6.100.000,00.

- 2) *Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*

Pagu: Rp 6.015.000,00

- a) *Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Target: 6 Laporan.

Pagu: Rp 6.015.000,00.

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. *Pagu Anggaran Program: Rp 149.806.200,00.*

Program ini mendukung pencapaian Sasaran *Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum*, dengan Indikator Sasaran *Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan*, dengan target 7%.

- b. *Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan:*

- 1) *Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*

Pagu: Rp 149.806.200,00

- a) *Sub Kegiatan: Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*

Indikator: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

Target: 250 Orang.

Pagu: Rp 90.820.000,00.

- b) *Sub Kegiatan: Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*
Indikator: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
Target: 300 Orang.
Pagu: Rp 46.806.200,00.
- c) *Sub Kegiatan: Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.*
Indikator: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.
Target: 30 Orang.
Pagu: Rp 4.500.000,00.
- d) *Sub Kegiatan: Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.*
Indikator: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
Target: 8 Dokumen.
Pagu: Rp 7.680.000,00.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi sebagai penutup dokumen Rancangan Akhir Renja PD Kecamatan Garum Tahun 2026. Di dalamnya diuraikan catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut untuk memastikan implementasi Renja PD ini dapat berjalan dengan efektif dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

5.1. Catatan Penting

Berdasarkan seluruh proses penyusunan yang telah dilakukan, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026:

1) **Prioritas Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

Isu tidak tercapainya target Nilai SAKIP merupakan tantangan paling signifikan. Seluruh jajaran pimpinan dan staf di Kecamatan Garum harus memberikan perhatian khusus dan komitmen penuh untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan memperbaiki sistem manajemen kinerja internal.

2) **Penguatan Budaya Inovasi**

Keberhasilan inovasi MELONISTI dan RATU SEMUT harus menjadi pemicu untuk terus menumbuhkan budaya inovasi di seluruh lini pelayanan. Pelaksanaan Rencana Kerja 2026 harus senantiasa membuka ruang bagi gagasan-gagasan baru untuk menjawab tantangan dan dinamika kebutuhan masyarakat.

3) **Fleksibilitas Anggaran**

Pelaksanaan Rencana Kerja ini harus senantiasa memperhatikan dinamika ketersediaan anggaran daerah. Jika terjadi perubahan atau rasionalisasi anggaran, maka prioritas akan diberikan pada kegiatan yang berdampak langsung pada pencapaian Indikator Kinerja Sasaran utama dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah Pelaksanaan Implementasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Garum Tahun 2026 akan berpegang pada kaidah-kaidah sebagai berikut:

1) Akuntabilitas

Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik, keuangan, maupun manfaatnya. Prinsip akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas atas setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya dari sisi administrasi keuangan (bebas dari penyimpangan), tetapi juga dari sisi capaian fisik (output) dan dampak yang dihasilkan (outcome/manfaat) bagi masyarakat. Mekanisme pertanggungjawaban ini akan diwujudkan melalui penyusunan laporan kinerja secara berkala dan berjenjang, yang akan dievaluasi secara internal maupun eksternal untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan memberikan hasil yang terukur.

2) Transparansi

Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara transparan dan terbuka bagi pengawasan internal maupun eksternal. Pelaksanaan seluruh kegiatan harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan. Hal ini berarti bahwa informasi yang relevan mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan harus dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Transparansi akan diwujudkan melalui publikasi informasi melalui berbagai media yang tersedia serta sikap proaktif dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat dan lembaga pengawas, sehingga membuka ruang bagi pengawasan publik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

3) Efisiensi dan Efektivitas

Penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, waktu) harus dilakukan secara efisien untuk mencapai hasil yang efektif dan berdaya guna maksimal. Prinsip ini menekankan bahwa setiap penggunaan

sumber daya baik itu anggaran, sumber daya manusia (SDM), maupun waktu -harus dilakukan secara efisien untuk mencapai hasil yang efektif dan berdaya guna maksimal. Efisiensi berarti mencapai keluaran (output) yang maksimal dengan masukan (input) yang minimal, tanpa mengurangi kualitas. Sementara efektivitas berarti memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan mampu menjawab tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan akan senantiasa dievaluasi untuk memastikan tidak ada pemborosan sumber daya dan hasilnya benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan.

4) Partisipasi

Pelaksanaan kegiatan, terutama yang bersifat pembinaan dan pemberdayaan, harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan kegiatan, terutama yang bersifat pembinaan, pemberdayaan, dan pelayanan, harus senantiasa membuka ruang dan mendorong keterlibatan aktif dari masyarakat serta pemangku kepentingan terkait. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran fisik dalam kegiatan, tetapi juga sebagai keterlibatan dalam memberikan masukan, melaksanakan, serta ikut mengawasi jalannya program. Dengan adanya partisipasi, program yang dilaksanakan akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata (aspiratif) dan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan akan semakin kuat.

5) Sinergi dan Koordinasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi harus senantiasa mengedepankan sinergi dan koordinasi, baik secara internal antar seksi maupun secara eksternal dengan Perangkat Daerah lain, Pemerintah Desa, dan unsur Forkopimcam. Pelaksanaan tugas dan fungsi tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral. Prinsip ini menekankan pentingnya membangun hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Sinergi dan koordinasi harus senantiasa diutamakan, baik secara internal antar seksi di lingkungan Kecamatan Garum untuk memastikan soliditas gerak langkah, maupun secara eksternal dengan Perangkat Daerah lain, Pemerintah Desa, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam)

seperti Polsek dan Koramil. Dengan sinergi yang kuat, berbagai sumber daya dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan bersama secara lebih efektif.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut Setelah ditetapkan dokumen Rancangan Akhir Renja PD Kecamatan Garum Tahun 2026 ini, langkah-langkah selanjutnya yang akan ditempuh adalah:

- 1) Dokumen Renja PD ini akan menjadi pedoman utama bagi Kecamatan Garum dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Tahun Anggaran 2026.
- 2) Pimpinan akan melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran aparatur Kecamatan Garum untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap tujuan, sasaran, dan target yang harus dicapai.
- 3) Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan).
- 4) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2026 ini akan menjadi bahan utama dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2026 dan menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya (2027).

Garum, 08 Agustus 2025

CAMAT GARUM

FRAZAO CASTELO, S.E.

Pembina

NIP. 19780515 200012 1 003